
INDONESIA NET ZERO SUMMIT 2023

It's Now or Never!

Sabtu, 24 Juni 2023

Djakarta Theater XXI, Jakarta

Sesi C3

“Menciptakan Lingkungan Politik Indonesia yang Pro-Iklim”

MODERATED DISCUSSION

Manik Marganamahendra, Moderator:

Saat ini, bagaimana *status quo* dan arah kebijakan untuk menangani masalah krisis iklim? Apakah diperlukan lingkungan atau proses politik untuk memaksimalkan keterlibatan seluruh pihak, khususnya masyarakat kecil yang rentan terhadap krisis iklim?

Adhityani Putri (Yayasan Indonesia Cerah), Panelis:

Coba kita uraikan satu persatu dahulu. Aku ingin merefleksikan yang Mas Manik sampaikan mengenai pentingnya proses politik bagi kebijakan iklim.

Saat *opening* sudah disebutkan bahwa *we are running out of time*, secara spesifik diukur karena di tahun 2030 seharusnya dunia mencapai *milestone-milestone* tertentu. Di tahun 2050, *milestone* utama yang direkomendasikan oleh panel ilmuwan dunia itu adalah mencapai *net-zero*. Maka itu, tema kegiatan ini adalah ‘*Net-Zero Summit*’. Tahun 2030 itu sebenarnya 7 tahun dari sekarang, sekitar 1,5 *cycle* politik untuk kita karena kita akan Pemilu di tahun 2024. Di tahun 2024, kita akan memilih pemerintahan baru — pemerintahan di nasional maupun daerah — untuk sampai tahun 2029, yang berarti sisa 1 tahun menuju tahun 2030. Hal ini berarti kebijakan-kebijakan kunci untuk mengantar Indonesia mencapai *milestone* pertama di tahun 2030 harus sudah diletakkan dari sekarang dan diletakkan di pemerintahan yang akan datang.

Pertanyaan tadi mengenai bagaimana kebijakan dan *status quo* sekarang. Tanpa harus terlalu dalam masuk ke sana, sudah ada beberapa yang disebut juga dari tadi pagi.

Pertama adalah ambisi iklim kita masih belum memadai. Masih banyak yang menilai bahwa target-target yang dicanangkan Indonesia, misalnya yang terejawantahkan dalam *nationally-determined contribution* atau NDC (Nationally Determined Contribution), masih jauh dari apa yang seharusnya kita bisa sumbangkan. Tertera target 31,89% di dalam *enhanced NDC*. Akan tetapi, banyak analisis mengatakan bisa lebih. Wajib mengingat status kita dan mengingat potensi kita. Kemudian terdapat juga target-target di sektor-sektor tertentu, mulai dari kehutanan, pemanfaatan lahan, sampah, dan energi. Masih banyak *gap* yang harus didongkrak dan ditambah lagi ambisinya.

Kedua, seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Dino, komitmen Indonesia masih labil. Pak Dino sudah menyebutkan banyak faktor. Sebagai contoh, dari sisi hukum dan ketatanegaraan, kita masih belum mempunyai UU Perubahan Iklim. DPR sebentar lagi habis masa jabatannya, artinya kita harus mengandalkan pemerintahan di masa depan. Apakah bisa pemerintahan yang kedepan mengukuhkan aksi-aksi iklim dalam produk-produk perundang-undangan yang permanen? Misalnya, seperti model

IKN (Ibu Kota Nusantara). IKN memiliki produk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, banyak yang mengatakan *it's definitely going to happen* karena sudah tertuang dalam UU. Bagaimana dengan aksi iklim? Sebagai contoh, UU mengenai aksi iklim yang ada hanya mengenai ratifikasi Perjanjian Paris.

Berikutnya adalah aksi-aksi iklim yang ambisius belum terintegrasi dengan pembangunan Indonesia ke depan. Hal ini bisa kita lihat di berbagai dokumen pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, mengapa proses politik ke depan menjadi penting? Bukan hanya setiap kali kita memilih presiden dan pemerintahan baru, kita juga memiliki rancangan pembangunan jangka menengah, biasanya setiap 5 tahun. Tahun depan, kita akan memiliki Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

RPJMN itu 5 tahun sekali, RPJPN itu 25 tahun sekali. Oleh karena itu, hal ini sangat krusial. Pemerintah baru bukan hanya akan meresmikan RPJMN hingga tahun 2029, tetapi juga hingga tahun 2049. Tahun 2045 adalah target utama, maka itu nama RPJPN-nya adalah 'Visi Indonesia Emas.' Proses politik ini akan menjadi penentu apakah aksi-aksi iklim ada dan terintegrasi dengan model pembangunan Indonesia ke depan. Ini mengapa kita membutuhkan proses politik. Tadi ada yang menyebutkan juga bahwa *policy making* sebagian teknokratis dan sebagian lagi politik. Ini poin yang sangat bagus. Untuk memastikan kebijakan iklimnya bagus, bukan hanya keahlian untuk membuat kebijakan yang secara teknis bagus, tetapi juga dibutuhkan *political willingness* dan *political support*. Oleh karena itu, proses politik yang baik, bersih, dan sehat menjadi penentunya.

Manik Marganamahendra, Moderator:

Menarik sekali bahwa ternyata Indonesia bukan hanya tidak cukup ambisius, bahkan cenderung plin-plan dengan komitmen yang tidak jelas. Apakah kita memang punya arah untuk ke arah pro-iklim atau justru sebaliknya? Tadi sudah ditunjukkan bagaimana kondisi politik dan kebijakan kita.

Sekarang saya ingin beralih ke Mbak Titi. Tadi kita sudah membahas bahwa kita punya target sebenarnya. Ada RPJMN dan RPJPN yang mungkin jadi salah satu momentumnya. Untuk Mbak Titi, sebenarnya seperti apa kondisi lingkungan politik kita saat ini? Apakah memang sudah cukup pro terhadap masalah iklim atau justru berkebalikan? Apakah kita bisa menciptakan kondisi politik yang kondusif untuk akhirnya mendorong adanya kebijakan-kebijakan yang pro iklim juga?

Titi Anggraini (PERLUDEM), Panelis:

Bagi saya yang bergerak di isu pemilu dan demokrasi, ini hal-hal yang terasa terputus. Membicarakan isu pro-iklim di isu pemilu dan demokrasi rasanya kering sekali. Tahun 2024 adalah tahun politik akbar atau mega politik. Sebagai ilustrasi, pada 14 Februari 2024; kita sering menyebutnya sebagai Hari Kasih Suara. Di Hari Kasih Suara akan ada 580 orang anggota DPR, 152 kursi DPD, 2.372 kursi DPRD Provinsi, dan 17.510 kursi DPRD Kabupaten/Kota yang kita pilih. Ini yang mengantarkan kita menjadi sangat luar biasa dalam konteks tata kelola pemilu di dunia sebagai pemilu serentak terbesar satu hari di dunia dengan pemilih yang diproyeksikan 203 juta orang lebih, di dalam negeri saja dan belum termasuk di luar negeri. Memilih 5 posisi sekaligus, belum termasuk satu posisi yang sangat penting, yaitu presiden dan wakil presiden, memberikan tantangan tersendiri. Serentak, dalam satu hari, jumlah pemilih yang sangat besar dengan 38 provinsi dan 508 Kabupaten/Kota. Jadi, bisa dikatakan, membayangkan teknisnya saja kita sudah merinding, belum lagi bicara soal substansinya. Tapi, apakah kemudian isu pro-iklim itu sudah mewarnai lingkungan politik kita? Belum.

Kita masih disibukkan dengan persoalan-persoalan yang karena pemilunya rumit, orang lebih banyak bicara bagaimana mengatasi kompleksitas pemilu. Walaupun teknis itu bisa jadi politis kalau tidak dikelola dengan baik. Misalnya anasir-anasir, kalau kita gagal mengelola logistik pemilu, tidak akan ada pemilu kalau tidak ada logistik. Belum lagi isu-isu yang sifatnya sangat politis sekali. Siapa yang akan menduga bahwa di 25 tahun reformasi kita akan diskusi pemilunya jadi atau tidak? Bagi negara yang bisa dikatakan di tengah iklim demokrasi yang sudah sangat terbuka, kita masih diskusi pemilunya jadi atau tidak, presiden tiga periode, perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu. Itu semua sesuatu yang sebenarnya agak menjauhkan kita dari substansi. Maka itu, saya suka bilang isu-isu yang sifatnya politik elit menjauhkan kita dari politik gagasan, politik program, apalagi hal-hal substantif tentang politik pro-iklim.

Memang yang asik itu bicara debat “warung kopi”. Tujuh hari tujuh malam bisa diskusi dengan teori konspirasi mengenai pemilu jadi atau tidak, tapi bicara politik gagasan perlu komitmen, pemahaman, bicara sesuatu yang kadang-kadang membutuhkan data. Bicara soal hal-hal yang tadi, adrenalin kita bisa naik, terlihat lebih menyenangkan. Jadi, bisa dikatakan kita masih punya pekerjaan rumah untuk bicara soal politik pro-iklim. Termasuk kalau kita tonton debat-debat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedikit sekali kepala daerah yang bicara visi dan misi agenda pro-iklim, bagaimana mereka merencanakan pengelolaan sampah, dan seterusnya. Jadi, tampaknya itu masih jauh dari pandangan para politisi dan mereka yang akan duduk sebagai pembuat kebijakan.

Manik Marganamahendra, Moderator:

Jadi, bahasan-bahasan “warung kopi” ini memang panjang dan berkali-kali jadi pembahasan, bahkan menghabiskan waktu kita untuk akhirnya punya pandangan ke depan — memangnya Indonesia ini mau seperti apa dan akan melakukan apa saja. Hal yang menarik, Mbak Titi, saya juga mau bertanya, adakah cara yang memungkinkan kita untuk menuntut para politisi kita agar mereka mau tidak mau mengikuti kemauan kita? Secara elektoral, pembahasan isu pro-iklim ini juga baik untuk mereka.

Titi Anggraini (PERLUDEM), Panelis:

Pertama, yang punya suara itu kita. Politisi takutnya dua saja. Satu, dia takut tidak terpilih dan yang kedua tidak dapat kursi. Kalau partai itu takutnya dua. Satu, dia tidak jadi peserta pemilu alias tidak lolos verifikasi dan yang kedua dia tidak dapat kursi, seperti politisi. Kita harus sadar kendali itu sebenarnya ada di kita, cuma kadang-kadang kita menganggap “*one person, one vote, one value*”. Kalau hanya itu, tidak ada harganya.

Jadi kesadaran bahwa pemilu itu memberi makna, menurut saya, harus dibangun pada diri kita. Ketika kita sudah punya kesadaran bahwa pemilu punya makna — bahwa kita yang menentukan suara itu — mulai kita mencari kelompok-kelompok yang punya suara yang sama. Misalnya, Mbak Afu mempunyai *Think Policy*. Kalau saya dengan teman-teman berusaha untuk membangun relasi dengan teman-teman BEM, teman-teman OSIS, untuk kemudian lebih peduli pada apa yang dibawa oleh partai.

Teman-teman tahu tidak, partai politik peserta Pemilu 2024, 18 partai untuk nasional ditambah 6 partai politik lokal di Aceh — jadi, Aceh ada 6 partai politik lokal — sudah ditetapkan sejak 14 Desember 2022. Tapi pertanyaan saya, teman-teman sudah tahu belum visi-misi dan program apa yang mereka bawa? Rata-rata tidak. Dalam konteks itu, saya sudah melihat dan merasa ada keterputusan antara apa yang seharusnya diperankan partai politik di pemilu dengan kita sebagai pemilih yang seharusnya mendapatkan paparan informasi.

Jadi, yang pertama, menurut saya kesadaran bahwa kita punya pengaruh. Suara kita yang memberi makna pada keberadaan mereka nanti. Kita yang memutuskan mereka jadi atau tidak. Itu harus dilengkapi dengan membangun aliansi strategis. Apakah kelompok hobi, kelompok isu, kelompok yang levelnya meningkat lagi advokasi yang mau didorong, misalnya pro-iklim, dan akses pada informasi yang memadai. Karena saya berinteraksi dengan teman-teman OSIS di Jabodetabek dan melatih mereka untuk menjadi pemantau pemilu. Keluhan terbesar adalah kesulitan mendapat akses pada informasi. Kemauan itu ada, kelompok sudah terbentuk, tapi informasi tidak tersedia.

Pemilu itu bukan cuma hari-H. Kita harus mulai mengawal dari sekarang, misalnya soal isu pro-iklim. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bilang ada sekian triliun dana-dana ilegal sumber daya alam mengalir pada para aktor politik. Bukan soal kita tahu saja mereka bawa apa, tapi mereka ditopang oleh dana yang bersih atau tidak. Kalau dari awal saja mereka ditopang oleh dana yang tidak bersih, jangan berharap kebijakan mereka adalah kebijakan yang bersih. Kalau sejak awal saja mereka ditopang, misalnya oleh dana-dana ilegal, jangan pernah berharap mereka punya visi besar tentang pro-iklim dan Indonesia ke depan.

Hal itu yang menurut saya yang bisa kita rebut. Pertama, merebut pemahaman itu. Kedua, bagaimana mengorganisir kelompok supaya kesadaran itu meluas. Ketiga, kemampuan untuk mendapatkan informasi sebagai basis kita menjadi warga negara yang aktif.

Manik Marganamahendra, Moderator:

Terima kasih banyak, Mbak Titi. Ini jawaban yang sudah sangat komprehensif — bagaimana akhirnya kita bisa merespon dan mengambil sikap sebagai masyarakat untuk akhirnya kita yang justru *me-drive* pemilunya mengarah ke mana, bukan justru para politisinya nanti.

Setelah ini, kita ingin memperdalam dari jawaban Mbak Titi untuk Kak Afu. Kalau dari Kak Afu sendiri, kira-kira perspektif kondisi politik seperti apa yang justru kompatibel untuk menopang ekonomi dan juga masalah lingkungan kita. Lalu, bagaimana cara mencapainya? *What are the strategic steps and who are the key players?*

Andhyta F. Utami (Think Policy Indonesia), Panelis:

Kalau *gue* bisa menjawab pertanyaan ini kayaknya Indonesia selesai. Ini pertanyaan besarnya. *How do we fix this?*

Aku ingin mulai dengan konteks *timeline*. Tadi dikatakan ini tahun yang penting. Ini tahun apa? Dalam konteks aksi iklim, 10 tahun ke belakang adalah waktu meng-*establish* motivasi dan urgensi. Banyak aktivisme iklim — dalam konteks dikaitkan dalam politik — masih dalam konteks kita perlu aksi iklim. Jadi, aktivisme itu selalu tentang aksi iklim. Nanti jam 4 sore, politisi-politisinya akan hadir dan membicarakan iklim. Berikutnya, menurut saya, 10 tahun ke depan adalah waktu periode politik untuk membicarakan solusi iklim yang tepat. Kalau apa adanya, memang benar masih banyak PR kita. Tapi menurut saya, iklim atau lingkungan sebagai *currency* itu sudah sampai di titik di mana politisi mau membicarakan. Beda sekali dengan 10 tahun ke belakang. Saya bekerja di sektor ini mungkin 10 tahun ke belakang, terasa sekali. Dulu itu masih, “*ayo, bicarakan iklim.*” Iklim itu pertanyaan terakhir di Debat Presiden. Sekarang, ada acara berkaitan dengan iklim, calon-calon presiden atau yang masih bakal calon atau mau bermain di dalamnya sudah datang. Permasalahannya tinggal siapa yang punya solusi iklim yang tepat. *It's a whole other game*. Jadi, aku mau ajak teman-teman untuk bangun bahwa yang kita cari bukan politisinya mengatakan, “*saya akan melakukan aksi iklim.*” Semuanya bisa bicara dan semua tahu orang muda peduli. Sekarang tentang

siapa yang solusi iklimnya adalah bentuk kapitalisme baru. Siapa yang solusi iklimnya bukan solusi tapi *diumpetin* sebagai solusi. Jangan mau kita dibodoh-bodohi. Tahun ini jauh lebih penting untuk kita memahami apakah benar, misalnya, kota Jakarta punya masalah, tapi apakah benar solusinya pindah ibu kota? Kita punya masalah sistem transportasi, siapa yang punya program untuk bangun transportasi publik? *Currency*-nya sangat berbeda tahun ini. Jadi, ini alasannya kita, anak muda generasi sekarang, punya PR yang lebih sulit untuk bisa memahami, bukan sekedar “ayo, kita perlu aksi iklim,” tapi jangan mau dibodohi dengan aksi iklim yang salah.

Masalahnya, dengan era informasi yang sangat *flooded* ini, kita punya lebih banyak *website* untuk membandingkan kalau mau beli iPhone atau Android, atau Android *handphone* yang “A, B, C”. Semuanya bisa kita *compare* secara menyeluruh. Akan tetapi, kita tidak punya mekanisme yang sama untuk membandingkan solusi-solusi yang ditawarkan tiap partai atau kita tidak punya mekanisme yang sama dan *se-simple* itu untuk membandingkan antar calon presiden. *This is crazy*. Memilih presiden dan partai dengan program yang tepat jauh lebih *monumental* terhadap hidup kita daripada beli *handphone* yang benar atau salah. Beli *handphone* yang benar atau salah itu mungkin rugi, kalau salah beli, 3 - 5 juta. Pilih presiden yang salah, memilih partai politik yang salah, dan anggotanya di dalamnya, dampaknya ratusan triliun. Bayangkan, APBN itu Rp 2 ribu hingga Rp 3 ribu triliun tiap tahunnya. Itu uangnya *at stake* dan bukan cuma pilih komparasi *handphone* saja.

Berangkat dari sini, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar tentang Bijak Memilih? Siapa yang pakai? *Shout out to* Bijak Memilih.

Bijak Memilih pada intinya adalah *website*, seperti untuk membandingkan *handphone* satu sama lain, akan tetapi ini untuk membandingkan isu, partai, dan kandidat presiden. Jadi, *please watch us out*. Kita masih mengembangkan website ‘*bijakmemilih.id*’. Kalau teman-teman ada *handphone* sekarang di tangannya, boleh sambil dibuka ‘*bijakmemilih.id*’. Kita adalah gabungan antara teman-teman yang melakukan riset. Lima isu dari 15 sub isu yang berdasarkan berbagai survey dianggap penting untuk orang muda dan kita bentangkan semudah mungkin, seperti apa saja *historical vote* dari para partai terhadap isu-isu tersebut.

Teman-teman, tahu apa saja kira-kira undang-undang yang keluar selama 5 tahun terakhir dan berhubungan dengan isu krisis iklim atau lingkungan? Ada tiga. Ada yang mau menebak apa saja undang-undang yang berhubungan atau yang dibahas masuk Prolegnas? Energi Baru Terbarukan (EBT) yang saat ini masuk Prolegnas, Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), UU Cipta Kerja tentu saja, dan UU Ibu Kota Negara. Itu juga isu lingkungan.

Di website Bijak Memilih, teman-teman bisa lihat spesifik *voting history* dari partai terhadap undang-undang tersebut. Jadi, kalau misalnya teman-teman cari tahu isu undang-undangnya itu apa, bisa lihat spesifik partai yang kemarin sudah terpilih itu *vote*-nya *for or against* topik-topik tersebut. Jadi tadi mungkin menanggapi sedikit yang Mbak Titi sampaikan, ketika kita ngomongin program ke depan, *it's very easy to lie*. Bicara itu *cheap*. Mudah untuk bilang mau melakukan apa. Makanya di Bijak Memilih kami fokusnya pada historinya. Jadi secara sejarah, benarkah mereka *vote* untuk program atau keputusan yang sesuai dengan komitmen lingkungan atau tidak? Kalau teman-teman mau memilih calon suami, mau mencari pacar, tentu saja yang *matter* apa yang sudah dilakukan, bukan sekedar ke depan. Meskipun dua-duanya penting. Jadi, perlu punya program yang baik dan juga ke belakang perlu baik. Jadi, tadi kalau ditanya, sistem politik yang diperlukan untuk mengarah nomor satunya adalah *informed electorates*. Kitanya sendiri perlu naik kelas. Kita perlu *graduate* dari sekedar menyukai atau paham politik atau mengikuti politik, dari sekedar, “*ini sepertinya*

kandidatnya baik atau tidak baik,” tapi kita harus benar-benar menyelami juga substansinya dan itu melelahkan. Kita harus akui dulu itu jauh lebih melelahkan, tidak nyaman, tapi maka itu Bijak Memilih hadir karena ingin membantu proses yang melelahkan itu agar tidak lagi melelahkan. Pertama, *a little less ‘capek’* daripada buka undang-undangnya satu-satu terus ngecek partainya *vote*-nya apa. Kedua, supaya teman-teman tidak merasa sendiri. Jadi, ini memang kita ingin jadikan *movement* dari orang-orang yang *ngerasa enough is enough. We need better politics* untuk Indonesia. Kita sebagai *voter*, sebagai *electorate*, sudah mau naik kelas. Tolong para politisi juga ikut naik kelas bersama kami.

Itu yang pertama dari *demand*. Jadi, ini *supply-demand*. Sekarang masuk ke *supply*-nya sendiri. Apa reformasi yang perlu terjadi di proses dan partai politik, sehingga mekanismenya atau proses ini jadi benar-benar mendorong solusi-solusi yang tepat untuk iklim? Pertama, tentu saja yang jadi penting sekali adalah pendanaan politik. Kami baru saja membuat konten di Bijak Memilih tentang bagaimana pendanaan politik itu punya pengaruh yang sangat besar, dan tentu saja politik balas budi dari partai terhadap yang membantu membiayai politik tersebut.

Di satu sisi, tanpa menyalahkan partai, *transactional cost* proses politiknya sendiri juga tinggi sekali. Memang ada insentif langsung, sehingga butuh biaya banyak untuk berpolitik. Sebenarnya, kalau biaya berpolitiknya jauh lebih rendah, *information spread* akan jauh lebih simpel, atau kompetisi itu mungkin tidak sebanyak ini, sehingga biaya transaksi menjadi lebih rendah dan ketergantungan terhadap pendanaan politik juga jauh lebih rendah. Bagaimana jika masih tinggi biayanya, pendanaan politik itu bisa dibuat transparan? Kita tidak masalah, ini bukan berarti politik tidak boleh *fundraise*. Tentu saja itu bagian dari proses politik. Tapi, bagaimana caranya kita memastikan transparansi dan bahwa tidak ada titipan-titipan di dalam prosesnya.

Kedua, tentu saja adalah orangnya. Proses kaderisasi di dalam partai politik harus jauh lebih tersistematis. Banyak sekali kita melihat, pada akhirnya, proses kaderisasi yang orang-orang yang muncul tiap tahun politik saja. Kalau kaderisasi sebenarnya di-*train*, direkrut, dan dilatih dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang politisi, atau untuk menjadi seorang pembuat kebijakan. Kemudian, mungkin tahun ini mereka *run*, 5 tahun lagi mereka *run*, belajar dari hal yang sebelumnya dan seterusnya. Itu kaderisasi. Hari ini — karena kembali lagi tadi pada sistem politiknya — ada insentif untuk sekedar merekrut yang sudah punya *fame* atau sudah punya sumber daya. Kembali lagi ke transaksi politik yang biaya tinggi dan harus dikenal masyarakat. Pada akhirnya, insentifnya tertuju untuk yang terkenal untuk masuk. Apakah terkenal sudah pasti berbasis merit? Tidak juga. Artinya, seharusnya urutannya tepat; kompetensi dulu, kemudian mungkin bagus kalau dia sudah ada *social capital* — *by all means*, orang yang udah punya *social capital* harus masuk dan kalau mereka punya sumber daya, *even better*. Tapi, artinya urutannya harus tepat agar proses kaderisasinya baik. Terakhir, sekaligus menutup, adalah yang di dalam. Yang selalu jadi pertanyaan itu setelah terpilih, seperti apa budaya di dalam partai politik setelah kandidatnya terpilih? Apakah benar kandidat tetap memiliki kuasa? Sebenarnya, indikasi kuasa yang terpilih. Jadi, dia punya basis *voters* di dapilnya dan seharusnya dia bisa menyuarakan benar-benar apa yang dibutuhkan oleh dapilnya. Yang terjadi, kalau misalnya teman-teman tidak tahu, di dalam DPR itu setelah terpilih, ada fraksi. Tiap partai itu punya *‘geng’*-nya sendiri di dalam DPR dan ada budaya yang membuat fraksi itu harus selalu *voting as a whole*.

Anggap saja teman-teman masuk ke dalam sebuah partai ini, sudah masuk ke dalam fraksinya. Bisa jadi *individually* kamu setuju atau tidak setuju sama RUU EBET. Tapi, fraksinya bilang tidak bisa, *vote*-nya harus sesuai dengan mengikuti fraksi ini. Artinya, kekuasaan tiap anggota itu, kalau

partainya sendiri belum mereformasi budaya mereka, bisa terbatas pada praktiknya. Belum lagi terakhir, ada mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) — dimana aku baca undang-undangnya. Anggota DPR atau DPRD bisa digantikan di tengah periode mereka menjabat. Harusnya bisa karena sakit, karena urusan keluarga, karena meninggal dunia. Tapi, ada lagi satu pasal spesifik yang menyebutkan sesuai dengan ketentuan dari pemimpin partai politiknya. Jadi, kapanpun pemimpin politik merasa kamu melanggar atau tidak sesuai dengan apa yang dia mau, kamu bisa diganti.

Partai memiliki kekuasaan yang sebegitu besarnya setelah orangnya terpilih. Bisa jadi kita punya harapan besar terhadap anggota-anggota yang sudah kita perhatikan satu-persatu, tapi jangan lupa kita harus *demand* juga untuk partai mengubah budaya, kaderisasi, transparansi biaya politik, dan juga menjaga proses teknokratis. Seharusnya yang terjadi setelah orang tersebut terpilih, bukan nanti bisa sekedar di PAW.

Penutupnya, ini iklan lagi, Bijak Memilih Fase 2. Teman-teman bisa cek di akhir Juli kita berencana *launch*, bisa *follow at 'bijakmemilih.id'* di semua platform. Kita akan membuat Instagram *profile* untuk semua partai dimana teman-teman bisa klik dan lihat berbagai informasi cepat tentang semua partai. Bisa di-*compare* dengan mengecek *handphone*, misalnya berapa persen dari partai ini yang perempuan, yang *under 40*, yang gen Z, data korupsinya *in the past* seperti apa antar partai? Bisa dibandingkan, dan juga posisi mereka terhadap berbagai isu yang tadi dibilang. Jadi, hanya dengan kita meng-*address information asymmetry*. Jadi, informasinya asimetris antara pembeli, makanya pembeli kalau tidak beli barang paling bagus itu biasanya karena *asymmetric information*. Kita mau ubah ini agar *information*-nya jadi simetris lewat Bijak Memilih dimana kita beri informasi, kita melakukan riset untuk teman-teman. Teman-teman tinggal lihat saja dan bisa langsung pakai dan mudah-mudahan bisa membuat *voting decision* yang tepat untuk aksi iklim yang lebih baik di Indonesia.

Manik Marganamahendra, Moderator:

Jadi kita butuh *e-commerce* untuk politisi. Kita lihat siapa kira-kira, bagusnya mana. Tadi menarik, teman-teman semua, bahwa sudah dibahas secara politik dan menyeluruh. Kita ini tidak bisa mengubah apa-apa kecuali ketua partai, ketua umum, yang bilang.

Jadi tadi kita sudah membahas dari A sampai Z bagaimana kondisi iklimnya. Tadi Mbak Dhitri sudah menjelaskan. Kebijakannya atau *policy*-nya itu sudah terlihat, tapi sayangnya kita tidak cukup ambisius. Bahkan bisa dibilang tidak punya komitmen yang kuat.

Di sisi lain, secara pemilu, kita juga melihat ternyata banyak sekali celah-celah yang akhirnya bisa dimanfaatkan — entah itu ala industri ataupun partai politik — untuk akhirnya bisa masuk menyusupnya, masuk yang tadi Kak Afu bilang, lewat adanya balas budi. Balas budi yang bisa kita sebut sebagai *conflict of interest*. Akhirnya, kebijakan ke depan berhubungan juga dengan urusan-urusan *finance* yang terjadi saat ini. Saya ingin memberikan ruang partisipasi yang bermakna untuk teman-teman kita, mungkin ada sesi tanya jawab terlebih dahulu sebelum nanti kita bisa kembalikan lagi ke narasumber. Ada yang ingin bertanya?

Q&A SESSION

Anisa, publik:

Saya kebetulan bekerja di sektor *renewable energy* yang masih 12% dari target kita 25%. Saya posisinya masih sangat awam di dunia *public policy*, tapi sangat sadar juga bahwa dalam praktiknya,

kami di industri sangat bergantung atas kebijakan yang diputuskan oleh pihak legislatif. Saya ingin bertanya, kebijakan tentang pro-iklim ini sebenarnya harus dijalankan seperti apa? Apakah kita memilih kebijakan yang bisa dibidang reformis atau ekstrim? Atau memang kebijakan yang nantinya dijalankan atau pilihan yang lebih adaptif? Kita semua ingin tujuannya *on-track* sesuai dengan target yang disampaikan oleh ilmuwan dan lain-lain. Kedua, saya masih dekat dengan dunia mahasiswa, karena baru saja lulus 1 atau 2 tahun lalu. Ingin tahu saja, sebagai masyarakat yang masih jauh dari diskusi ini atau mungkin tidak tahu banyak mengenai *net-zero*, mungkin para panelis bisa menyampaikan tiga poin yang harus kita maksimalkan supaya *every single Indonesian citizen should understand this*. Misalnya, mungkin 3 poin tentang *climate awareness* atau apakah *randomly* bertemu seseorang dan kita *educate – quick education – this is something you have to understand, three things, about climate*.

Pandu, Ecoxyztem:

Saya kalau berbicara tentang politik Indonesia, tahun 2018-2019 awal, itu *join* dengan asosiasi energi surya Indonesia (AESI). Dari 2019 sampai sekarang masih menjadi *member*, saat itu sempat ada di posisi *communication*, tapi sekarang makin ke belakang jadi *member* saja. Karena dari 2019 sampai sekarang 2023 isunya — *bottleneck problems*-nya — masih sama di situ-situ saja. Jadi, lelah sekali mengurus *policy* terus advokasi ke pemerintahan — *regulations* itu melelahkan sekali. Akhirnya 2021, bersama teman-teman membuat *venture builder climate tech* bernama “Ecoxyztem” sampai sekarang. Jadi lelah mengurus regulasi akhirnya *startup* saja, bisnis. Dari poin-poin tadi untuk bagaimana kita bisa partisipasi membangun untuk *policy making* di Indonesia agar lebih pro-iklim belum disentuh bagian ekonominya. Ekonomi hijau itu bagaimana? Karena sampai sejauh ini yang terlihat, ini pandangan pribadi boleh dibenarkan atau tidak, bahwasanya pembuatan *policy* banyak yang *at the end* ada *interest*-nya di belakang, apakah yang partai ini punya tambang atau partai yang ini menguasai sektor tertentu. Bahkan, katakanlah *renewable energy* ada yang *nge-drive* di partai tertentu karena mereka mempunyai aset di sana. Ujung-ujungnya ekonomi. Untuk kami, disini pekerjaannya macam-macam, ada di *corporate* atau mahasiswa dan lain-lainya. Apa yang bisa kita lakukan terkait dengan ekonomi hijau? Mungkin kalau ngambil ke arah *policy* agak jauh *gap*-nya. Sehari-hari kita tidak mengerjakan *policy*, tapi untuk arahnya ekonomi, apa yang kita bisa *drive* untuk ke arah ekonomi hijau? Apakah memang benar ekonomi itu menjadi landasan untuk *policy making* atau bisa dibantah kalau sebenarnya ekonomi tidak terlalu berpengaruh.

Eko Fajar Setiawan, publik:

Sebelumnya saya pernah berkegiatan pada 2019 sebagai staff Mbak Titi di Perludem. Waktu itu saya masih mahasiswa ITB, sekarang sudah kerja wiraswasta dan LSM. Kebetulan kami berkegiatan dengan teman-teman Kades, Bumdes, dan lain-lain, jadi silahkan kalau ada yang mau berinvestasi ekonomi biru atau hijau dan ke desa bisa nanti kita koordinasi. Yang pertama, mungkin persoalan politik dan lingkungan ini dilematis. Apakah mungkin kita bisa melakukan regenerasi aktor? Artinya, dalam konteks gerakan-gerakan lingkungan ini menyebar, ada yang konteksnya di tiap desa, ada yang dalam konteks LSM internasional maupun nasional, banyak. Tapi kalau tidak ada orang seperti Manik yang mencalonkan diri, tidak akan ada *figure* regenerasi yang bisa mengisi itu. Saat ini, saya banyak menemani anak-anak muda yang memang dulu masih satu visi dan aktif di BEM, akhirnya mencalonkan diri seperti Manik, mungkin 2 tahun atau 3 tahun di atas Manik, tapi setelah dia masuk partai malah tumpul. Tidak ada gagasan-gagasan yang dulu dia pernah kita perdebatkan. Bagaimana caranya menumbuhkan regenerasi idealisme, regenerasi aktor agar tetap terus ideal dalam konteks pergerakan lingkungan? Yang kedua, apakah kita bisa memberikan aspirasi ataupun sistem yang lebih inklusif dalam pembangunan desa? Apalagi dalam desa dan lingkungan ini kita banyak bicara tentang lingkungan di perkotaan, kenapa tidak di desa langsung? Pertambangan ada di desa,

kehutanan ada di desa, tapi sektor ini jarang yang kita diskusikan lebih lanjut. Bahkan kepala-kepala desa ini juga sudah membentuk koloni dan langsung hirarkinya ada di orang-orang partai. Jadi saya tetap percaya Pemilu akan keren, tapi di satu sisi, bagaimana cara menumbuhkan idealisme lingkungan untuk para pemimpin-pemimpin?

Manik Marganamahendra, Moderator:

Pertama, pertanyaan dari Anisa, bagaimana kebijakan publik bisa pro-iklim, sebenarnya idealnya seperti apa? Dan apakah bentuknya reformis atau cukup ekstrim? Apakah kita perlu adaptasi saja atau benar-benar mengubah secara total, mana yang lebih ideal? Kemudian, 3 poin apa saja untuk menyederhanakan masalah iklim ini kepada masyarakat awam? Kemudian, dari Mas Pandu, kalau kita bicara tentang ekonomi hijau, apa sebenarnya *interest* politik yang bisa kita siapkan? Karena biasanya ada politisi-politisi yang memang sudah punya industrinya masing-masing, sehingga balik lagi ekonomi yang malah *nge-drive* kondisi politik kita. Bagaimana kondisi idealnya? Kemudian, pertanyaan dari Mas Fajar, mungkinkah kita melakukan regenerasi politik, tapi di sisi lain pada akhirnya kenyataannya biasanya yang sudah masuk ke dalam partai politik itu tidak lagi punya suara yang cukup kuat dibandingkan ketika mereka sebelumnya menjadi aktivis. Terakhir, bagaimana menguatkan masyarakat desa supaya mereka juga lebih *aware* tentang masalah politik dan juga masalah lingkungan? Karena justru eksploitasi sumber daya alam itu banyak terjadi di daerah pedesaan.

Andhyta F. Utami (Think Policy Indonesia), Panelis:

Mungkin kalau teman-teman membaca buku BPUPKI, Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bukunya itu ada di beberapa rapat. Dapat dibilang bahwa para *founding fathers* kita sudah membayangkan partai politik dan fungsinya. Muhammad Hatta bilang fungsinya adalah sebagai wadah arus pemikiran, jadi semestinya proses politik memang adalah pertentangan arus pemikiran. Maka, ketika tadi dibilang reformis atau adaptif? Mungkin yang saya pahami, *abrupt* atau *gradual* pilihannya. Itu *trade off*, artinya kalau kita pilih yang “A” akan ada konsekuensi, kalau kita pilih “B” akan ada konsekuensi. Kalau kita pilih *abrupt* akan ada konsekuensi, misalnya terhadap ekonomi yang bisa jadi berubahnya kencang, tapi bisa saja itu yang kita butuhkan supaya dampak krisis iklimnya tidak terlanjur *irreversible* parah. Atau kita bilang, “*Oh tidak bisa, ekonominya harus kita jaga dulu.*” Makanya *gradual* perubahannya, tetap ada konsekuensinya. Tapi, ada konsekuensi bahwa dampak iklimnya akan jauh lebih parah. Misalnya, kekeringan, banjir, itu *trade off*-nya.

Proses politik semestinya adalah pertentangan nilai-nilai *trade off* ini. Masyarakat Indonesia, di dalam kondisi demokrasi yang sangat ideal, seharusnya masyarakat yang memutuskan bagaimana pertentangannya. Idealnya, akan ada partai-partai yang mengedepankan bahwa kita butuh aksi yang lebih berani dan cepat, karena ini yang dibutuhkan untuk iklim. Ini saya membayangkan dunia yang idealnya, ada partai yang akan bilang “*Tidak bisa, kita harus gradual.*” *Voting* itu sebenarnya pertentangan pilihan tersebut, nilai-nilai pilihan tersebut. Kita banyak melihat demokrasi-demokrasi yang mungkin lebih dewasa atau lebih tua di seluruh dunia bahwa sebenarnya proses politik itu pertentangan nilai-nilai pemikiran tersebut. Kalau mau ekstrim yang bisa lihat ke Amerika. Contohnya, *Pro-Life* atau *Pro-Choice*. Itu adalah pertentangan yang tidak ada yang *objectively* benar atau salah. Semua ini konsekuensi dari pertentangan nilai.

Inilah *the beauty of politics* seharusnya. Ini kesempatan pesta demokrasi, di mana kita menyuarakan yang menurut kita masuk akal, yang *gradual*, atau jika menurut kalangan muda, banyak yang lebih *anxious*, artinya kita harus yang lebih berani untuk mempercepat. Itu proses yang pertentangan pemikiran. Begitu sudah selesai *election*, berarti yang menjadi administrasi dan memenangkan proses

politik dipilih oleh rakyat yang bilang, “*Tidak, kita mau gradual.*” Masuk kita ke proses teknokratis, di situlah proses kebijakan publik masuk, artinya di level teknokratis, ini lah ruang yang relatif lebih objektif. Akhirnya masuk ke strateginya akan seperti apa. Di situlah orang-orang teknokratis yang masuk ke sistem, bukan politisi, karena politisi harusnya nilai yang di-*capture* adalah *decision making leadership*-nya. Di sinilah baru *engineer*-nya dan pebisnisnya masuk di dalam proses teknokratisnya setelah kita putuskan reformis, *gradual*, atau *abrupt* tadi. Kalau pertanyaannya diganti saya sendiri percayanya apa, karena saya mau hidup dengan nyaman, saya cenderung akan lebih mengarah ke yang kita perlu aksinya jauh lebih *bold* dari sekarang. Saya kira kita perlu cerdas dalam me-*manage* transisi dan itu kenapa kita pakai kata kunci transisi. Kenapa kita sebut transisi? Karena memang perlu ada perencanaan. Tidak bisa kita besok tiba-tiba kita mematikan semua PLTU, tidak bisa, tapi secepat apa dan selambat apa akan ada titik optimalnya yang menurut saya sekarang kita belum *bold enough*.

Lalu kalau masuk ke masyarakat awam, kita membicarakan ini dalam konteks apa itu politik dan seperti apa. Ada tiga tipologi isu kalau membicarakan iklim. Ketika kita jadikan satu isu iklim, biasanya memang kurang *relatable*, tapi kalau kita *breakdown* ke akar, saya kira ada tiga kontekstualisasi dampak iklim yang di tiap daerah itu beda. Bisa jadi petani itu tidak membicarakan perubahan iklim, tapi kekeringan dan gagal panen sudah dialami. Jadi, sebenarnya perubahan iklim adalah isu kekeringan dan produksi pertanian. Perubahan iklim adalah pertanian sebenarnya yang perlu dibahas. Kalau kita membicarakan *urban center*, terutama di Jakarta, banyak kota lain yang mempunyai masalah utama, yaitu energi dan transportasi. Di situlah emisi paling besar dari penggunaan energi listrik, dan *power* yang kita pakai dan *transportation model* apa yang kita pakai. Seberapa besar energi yang digunakan gedung yang telah kita bangun, efisiensi energi rumah, semua itu *urban*. Terakhir, teman-teman di wilayah pesisir jadi yang kerja di *coastal areas*. Jadi *coastal problems* dari *climate change* itu spesifik, seperti kenaikan permukaan air laut, dan sebagainya. Itu adalah masalahnya sendiri. Saya kira akan lebih relevan arahnya ke Pilkada karena di level sub nasional akhirnya akan semakin relevan, apa rencana-rencana politisi lokal untuk tipologi masalah tersebut yang menurut saya lebih *grounded* ke masalah yang dihadapi. Di tempat kerja kami sebelumnya, pernah *develop* 18 tipologi dampak iklim berdasarkan mana yang lebih berdampak, misalnya, hujan dan produksi *agriculture* dan segala macam, itu ada 18 tipologinya. Jadi bisa lebih di *ground*-kan.

Selanjutnya terkait dengan ekonomi hijau. Kita sudah bisa menerima itu sebagai keniscayaan saja sebenarnya lumayan *depressing*. Kita sudah menerima bahwa politisi kita pasti pengusaha. Dalam proses politik yang ideal, dan saya tidak anti sektor privat, tapi harusnya ada *dance* antara pengusaha dan penguasa karena dansanya tarik ulur dimana penguasa fokusnya mendorong pasar, membuat pekerjaan, membuat mekanisme produksi yang paling efisien. Kemudian ada pemerintah yang fungsinya mengoreksi kegagalan-kegagalan pasar misalnya, “*Ada resiko monopoli saya akan masuk,*” atau “*ada resiko ini tidak efisien atau berdampak pada lingkungan saya akan masuk.*” Seharusnya dansanya seperti itu. Akhirnya *we are deprived of our right to see this dance* karena penguasanya juga pengusaha, ‘*PenguaSaha.*’ Ketika ini adalah kasusnya, mau tidak mau balik ke yang tadi saya bilang di awal, memang kita perlu agak lebih sensitif terhadap solusi yang ditawarkan. Artinya benar-benar kita lihat dari berbagai opsi yang ada dan ini memang ada *science behind it*. Lebih memahami yang mana yang benar-benar solusi jangka panjang dan mana yang bisa jadi solusi sementara. Tidak masalah juga beberapa solusi sementara kita ambil, tapi solusi sementara mana yang tidak akan *locking us in* masalah jangka panjangnya. Banyak juga sebenarnya studi terkait industri hijau. Ada analisis, misalnya kesempatan industri hijau yang untuk masing-masing negara beda dan yang perlu didorong apa, ada *comparative advantage* dalam *international trade*, dan lain-lain. Salah satu kekuatan utama Indonesia, terutama dalam *natural capital*-nya, terutama jika membicarakan solusi

iklim dari aspek ekonomi, sebenarnya menarik sekali. Kita bisa lihat dalam konteks alternatif ekonomi yang sifatnya ekowisata, restorasi, dan sebagainya. Itu jadi menarik untuk dilihat lebih lanjut, dan tentu saja sektor-sektor industri lain juga.

Terakhir, terkait dengan regenerasi aktor, maka saya pesan kepada Manik untuk tetap *istiqomah* jika sudah masuk ke sistem. Tapi memang perlu reformasi budaya, bagaimana caranya? Ada argumen bahwa ketika masuknya ramai-ramai, sehingga di dalamnya mau tidak mau akan berubah. Ada juga yang berargumen untuk buat partai baru. Tapi selama transaksi politik yang masih tinggi, partai baru pun akan jatuh ke dalam siklus yang sama. Memang ini adalah PR untuk kita, tapi menurut saya *critical mass*-nya harus didahulukan. Ketika *voters*-nya lebih cerdas, kita bisa lebih *demand* lebih baik, sehingga petinggi-tinggi elit partai politik menyadari bahwa mereka harus berubah, kaderisasi lebih baik, dan tentu saja lebih baik budayanya. Tentu idealnya undang-undang pun harus dipikirkan apa yang harus berubah, misalnya PAW harus lebih ketat prosesnya atau ada mekanisme transparansi yang lebih di-*push* di level undang-undang.

Manik Marganamahendra, Moderator:

Selanjutnya Mbak Titi.

Titi Anggraini (PERLUDEM), Panelis:

Saya suka memberikan Bimtek (Bimbingan Teknis) ke anggota DPRD, lalu komentarnya selalu, “*kenapa Pemilu yang tidak ditunda saja agar masa jabatan kita bertambah lagi?*”. Yang kedua, “*kenapa jual beli suara tidak dilegalkan saja?*”. Maka itu, saya katakan menetralsir antara yang di dalam studio dan keluar itu yang menjadi tantangan bagi saya. Saya bergerak dalam Pemilu sudah sejak ‘99, jadi tahun ini sudah tahun ke-24. Saya harus sering bertemu teman-teman supaya semangat itu nyala terus. Tapi satu *problem* besar dari iklim politik kita hari ini itu adalah uang; itu *problem* terbesar politik kita hari ini.

Uang di masyarakat berupa jual beli suara. Jual beli suara itu adalah musuh terbesar *electoral* kita hari ini karena dia mengubah suara rakyat yang seharusnya murni menjadi sesuatu yang bergantung pada uang. Satu dari tujuh pemilih pernah ditawari uang untuk ditukar dengan suara mereka.

Kedua adalah uang lagi; uang untuk membiayai kampanye politik. Semua selalu mengeluhkan bahwa Pemilu kita mahal, tapi kawan-kawan, coba cek laporan dana kampanye. Tidak mencerminkan argumen soal politik biaya tinggi. Jika melihat laporan dana kampanye, biaya politiknya itu semua standar-standar saja. Bahkan kita kaget, “*bagaimana bisa menang Pemilu hanya dengan uang segitu?*”. Berarti yang bahaya itu adalah uang. Uang ilegal atau uang-uang di area gelap yang tidak bisa diakses oleh transparansi dan akuntabilitas. Itu yang paling berbahaya.

Ketiga adalah uang untuk pembiayaan politik. Jika ditanya, “*bagaimana supaya politik kita bersih?*”. Satu jawabannya, uangnya harus bersih. Bagaimana kemudian kita berhadapan dengan situasi ini? Kebetulan karena saya angkatan ‘98, ada satu pekerjaan rumah besar yang kita tidak selesaikan, yaitu reformasi partai politik. Situasi hari ini, partai politik itu mengakses semua lini kekuasaan, bukan hanya untuk menang Pemilu, DPR, DPRD, kepala daerah, atau Presiden harus melewati jalur partai politik. Posisi apapun independen lembaga negara itu harus masuk lewat partai, minimal melalui *Fit and Proper Test* di DPR. Tetapi ketika bicara demokrasi internal partai, kalau teman-teman baca UU Partai Politik, disebutkan bahwa partai politik itu rekrutmen DPR atau DPRD berbasis kaderisasi yang demokratis berdasarkan AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) partai. Ketika ditarik ke AD/ART partai, ada partai yang bilang, “*sepanjang kita satu misi, walau baru satu hari*

masuk, sudah kader kita.” Jadi, ada *problem* besar, yaitu kita itu mereformasi hampir semua hal, tapi kita lupa mereformasi partai politik kita. Sekarang, partai politik bertransformasi menjadi sangat kuat.

Polanya begini, partai politik membutuhkan uang yang besar untuk membiayai partai, lalu masuklah pengusaha sebagai penanam modal atau investor politik karena dia mempunyai uang. Dia menjadi elit atau menguasai struktur elit di partai. Ketika dia menguasai struktur elit partai, dia menentukan rekrutmen politik; siapa yang mengisi posisi jabatan ini, siapa yang itu. Akhirnya menjadi lingkaran setan di situ. Di situlah kemudian politik kekerabatan atau politik dinasti menguat. Jadi, memang kalau kita bicara soal ini, bukan saya mengajak kita untuk pesimis. Ini yang kami promosikan sejak lama, UU Partai Politik itu harus diubah. Terakhir kali UU Nomor 2 tahun 2011; 12 tahun lalu dan sampai hari ini belum ada perubahan. Banyak dinamika yang tidak bisa ditangkap. Pendanaan politik itu tidak akuntabel kepada publik. Dana partai politik itu diaudit oleh kantor akuntan publik yang dipilih sendiri oleh partai politik. Mereka disuruh membuat laporan keuangan, ada arus besar, laporan harian, dan lain sebagainya, tetapi auditnya dilakukan oleh kantor akuntan publik yang dipilih sendiri oleh partai politik. Kita tidak punya instrumen untuk mengakses itu selain apa yang telah disediakan oleh partai politik. Bagaimana menghadapi situasi hari ini? Saya percaya lagi-lagi kita tidak boleh putus asa. Saya berusaha untuk memerankan gerakan sosial, aktivisme sosial, dan aktivisme hukum sebisa saya. Karena saya *background*-nya hukum, apa saja ruang hukum yang tersedia bagi publik, saya coba. Bisa uji materi ke Mahkamah Konstitusi, berkali-kali saya coba dan sukses ditolak, tetapi minimal itu membuat otoritas itu paham bahwa warga negaranya ada, sekecil apapun itu. Walaupun menangnya juga sering. Bagi kita, celah-celah ini harus selalu dimanfaatkan, apapun ruang yang tersedia untuk menunjukkan bahwa kita mampu memproteksi kebijakan yang demokratis, harus dimanfaatkan.

Kedua adalah aktivisme sosial. Ketika partai politik menentukan hukum, mungkin *ikhtiar* kita sangat sulit kalau tidak ada 100 Manik, baru kita bisa ubah kebijakan. Beri saya 10 Manik, masih kurang. Beri saya 580 Manik, baru berubah sepele. Saya percaya partai politik itu ada karena kita dan momen Pemilu itu untuk menunjukkannya. Kita berproses, tidak bisa langsung semua tunai pekerjaan itu di 2024, tetapi membangun gerakan sosial, membangun kesadaran masyarakat yang mau punya posisi tawar dengan partai atau dengan caleg, memang harus dimulai. Musuh besar kita adalah politik uang, terus terang saja. Walaupun dampaknya hanya 30%, tetapi itu yang sebagian besar diyakini oleh politisi untuk bisa mengamankan suara mereka.

Terakhir, saya setuju untuk mulai dari desa. Bagaimanapun juga *best practices* dari desa harus menjadi fondasi untuk regenerasi politik yang paling *genuine*. Selama ini kita masih ada keterputusan, desa luar biasa sekarang politisasinya menuju pemilu 2024. Masa jabatan mau dibuat 9 tahun, dana desa akan dinaikkan. Jadi, desa pun sekarang jadi komoditas politik. Oleh karena itu, desa pun harus kita kawal. Menurut saya, justru cara terbaik kita untuk melawan jual beli suara adalah dengan mengelola desa.

Manik Marganamahendra, Moderator:

Walaupun 580 Manik tapi tidak terpilih sama saja. Dari tadi saya merasa dikritik, tapi tidak masalah karena banyak refleksi. Jawaban terakhir dari Mbak Dhitri.

Adhityani Putri (Yayasan Indonesia Cerah), Panelis:

Saya coba singkat saja dan sifatnya melengkapi supaya teman-teman bisa membawa pesan yang sama pulang. Uang ini jadi masalah kita di dalam sistem perpolitikan kita. Januari tahun ini, PPATK menemukan Rp4,8 triliun yang diduga mengalir ke aktor-aktor politik dari *green financial crime*. Jadi

baru dari satu tipe kejahatan, kejahatan *financial* lingkungan, itu Rp4,8 triliun. Kalau akumulasi 5 saja sudah berapa. Itu dana-dana yang tidak terlacak dan ada yang tidak ada di sistem; dana-dana yang tidak ada sistem akuntabilitasnya. Tadi juga sudah disebutkan di dalam partai politik sendiri ada semacam peraturan-peraturan dan juga kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya bisa dirubah dengan adanya transparansi, akuntabilitas, dan juga intervensi hukum-hukum tertentu.

Sebenarnya merupakan peran kita semua untuk mendukung dan mengawal hal ini, tapi saya coba refleksi sebagai aktivis lingkungan. Saya sudah 15 tahun menjadi aktivis lingkungan. Ada semacam sekat kalau membicarakan isu krisis iklim; kita hanya ingin fokus ke isu dan topik, tetapi rada alergi membicarakan politik, karena merasa ribet dan apatis. Mungkin karena kita tidak belajar dari SMP atau SMA mengenai sistem seputar Pemilu ini. Ketidaktahuannya begitu besar, jadi kita sudah malas untuk mulai mempelajarinya, misalnya, yang dilakukan Kak Afu kemarin pada saat mulai setup Bijak Memilih dan dari sebelumnya mempelajari berbagai sistem yang mendasari pemilihan umum dan proses-proses legislasi. Kalau di banyak negara yang lebih matang demokrasinya, *civic education* mencakup belajar mengenai kelembagaan negara, peran mereka spesifiknya apa, dan proses-prosesnya. Mereka ikut menilai dan mengawal proses ini apakah sudah benar-benar memberikan ruang atau tidak kepada kita untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses mengambil keputusannya atau mengawal keputusannya.

Jadi mungkin *step* pertama adalah kita harus menormalisasi bicara soal politik; sistemnya, kelembagaannya, serta aturan-aturannya. Misalnya, ada berita mengegegerkan kemarin bahwa dana kampanye itu tidak perlu dilaporkan. Seharusnya kita melihat lebih banyak kemarahan seputar itu. Kita harus lapor SPT setiap tahun, tapi masa hajatan 5 tahun pesta demokrasi kita tidak perlu dilaporkan? Saya tidak melihat hal itu muncul di publik — kemarahan itu. Dari komunitas kita yang peduli dengan isu krisis iklim, kita juga seharusnya sama-sama marah, apalagi tadi mengingat Rp 4,8 triliun *from green financial crime alone*, belum dari *direct policy capture* karena ada ‘*PenguaSaha*’ di dalam pemerintah, kita tidak tahu dana-dana mengalir ke mana.

Kita harus menormalisasi bicara soal politik dan terlibat langsung di aspek politik. Jadi selain kita peduli krisis iklim sebagai topik, kita juga harus peduli dengan semua menyangkut kesehatan demokrasi kita dan sistem demokrasi kita. Sempat mencuat isu Golput dalam putaran pemilihan sebelumnya pada tahun 2019, yang di-*drive* oleh banyak dari komunitas gerakan lingkungan dan krisis iklim. Ini *justified*; kekecewaan-kekecewaan dengan sistem dan aktor-aktor politik tertentu karena sebelumnya kita sudah sepenuh hati mendukung. Kemudian, kaget dengan hasilnya yang seperti ini. Memang betul, Golput itu adalah hak kita sebagai pemilih, tetapi jangan sampai Golput itu kemudian merugikan kita sendiri dimana kita kemudian kehilangan kesempatan untuk merubah tidak hanya dari sisi siapa yang nantinya akan naik, tapi juga yang lebih fundamental yaitu kita kehilangan kesempatan untuk merubah sistem yang mendasari pemilihan umum itu sendiri, yang kemudian menjadi landasan dari demokrasi kita. Jadi itu yang mau mungkin saya tambahkan. Memang dalam proses yang sangat *imperfect* ini kita harus terus terlibat dalam upaya untuk menyempurnakannya.

Kemudian, merujuk pada isu ekonomi hijau, itu memang perlu di-*drive*. Saya juga setuju bahwa ketika kita mulai memunculkan bahwa mengatasi krisis iklim sesuatu yang bermanfaat secara ekonomi dan aktornya banyak, dan dari situ kemudian terbentuk *political mass*, jangan lupa dan jangan sampai kita menciptakan rente-rente baru. Kita membuat industri energi terbarukan yang terlibat orang yang sama lagi, kemudian kita melalui proses yang sama, yaitu *policy capture*. Sama saja bohong. Sistemnya harus dibenarkan juga. Energi terbarukan menjadi kurang baik ketika prosesnya masih sama dengan *business-as-usual* yang mendasari energi-energi kotor sebelumnya ini.

Terakhir, untuk regenerasi aktor, saya ingin memberi pesan bahwa banyak teman-teman yang berusaha masuk. Saya ingatkan, bukan hanya mendukung, tapi kita tidak boleh *cancelling*. Refleksi pribadi juga, kita mempunyai budaya jelek *cancelling people*. Dia masuk politik, sudah ada *image* jelek melekat pada kata-kata politisi. Padahal *we need them*. Kalau kita sendiri tidak mau masuk, kita jangan *cancelling* orang-orang yang berusaha masuk politik dengan berpikir bahwa mereka akan langsung berubah. Kita berikan *faith* kita kepada mereka dan kalau misalnya berubah, kita pastikan ada sistem yang bisa *keep them accountable* dan *on track*, dan juga sistem yang bisa *punish*, mempidanakan mereka jika mereka nanti salah. Itu sebenarnya kunci yang ingin saya sampaikan.